

ABSTRAK

Pendanaan bantuan hukum didasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pemberian bantuan hukum sangat terbatas. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah ? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pemberian bantuan dana kepada organisasi bantuan hukum. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di Wilayah Jawa Tengah, yaitu : (1) Anggaran Bantuan Hukum yang Terbatas, sehingga untuk mengatasi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam penyaluran dana bantuan hukum, menerapkan sistem proporsional dan selektivitas, (2) Minimnya Organisasi Bantuan Hukum yang Terakreditasi, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, terus mendorong organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi di wilayah-wilayah kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah untuk segera memenuhi persyaratan, (3) Jumlah Advokat yang belum memadai dalam satu Organisasi Bantuan Hukum, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah mendorong organisasi bantuan hukum untuk menjalin kerjasama dengan para advokat serta memperbanyak paralegal untuk pendampingan.

Kata Kunci : *Kebijakan Kementerian Hukum Dan HAM, Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Organisasi Bantuan Hukum, Jawa Tengah*

ABSTRACT

Funding of legal aid under the provisions of Article 16 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 on the Legal Aid charged to the State Budget, while the amount of budget allocated for the provision of legal aid is very limited. The problem is formulated as follows: (1) How is the implementation of the policy of the Ministry of Law and Human Rights in the provision of legal assistance to the underprivileged through legal aid organizations in Central Java? (2) What are the obstacles encountered and solutions in the implementation of policy of the Ministry of Law and Human Rights in the provision of legal assistance to the underprivileged through legal aid organizations in Central Java?

The aim of this research can be described as follows: (1) To determine and analyze the basic policy of the Ministry of Law and Human Rights in the provision of legal assistance to the underprivileged through legal aid organizations in the region of Central Java. (2) To identify and analyze the constraints faced and solutions in the implementation of the policy of the Ministry of law and human rights in the provision of legal assistance to the underprivileged through legal aid organizations in the region of Central Java.

The method used in this research is normative. In this thesis research specifications used descriptive analysis, the research is intended for humans, state / other symptoms.

Based on the results of research and discussion can be concluded: (1) the implementation of the policy of the Ministry of Law and Human Rights in the provision of legal assistance to the underprivileged through legal aid organizations in the region of Central Java has been carried out by the Regional Office of Central Java Province. Constraints and solutions in the implementation of the policy of the Ministry of Law and Human Rights in the provision of legal assistance to the underprivileged through legal aid organizations in Central Java Areas, namely: (1) Budget Legal Assistance Limited, To address the Ministry of Justice and Human Rights Regional Office in Central Java in disbursement of funds legal aid, it is necessary to apply a proportional system and selectivity, (2) lack of Legal aid organization that is accredited, to overcome this problem, the Ministry of Justice and human rights Regional Office in Central Java, continue to push the legal aid organizations that have not been accredited in the areas of the district cities across Central Java province to immediately meet the requirements, (3) the amount of the Advocate is not adequate in the Legal aid organization, to overcome these obstacles, the Ministry of Justice and human rights Regional Office in Central Java push legal aid organizations concerned to cooperate with the advocates there.

Keywords: Policy Ministry of Law and Human Rights, Legal Aid Society Disadvantaged, Legal Aid organization, Central Java